

# PENGARUH INTEGRITAS, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT: (STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA)

Shintya Isabella<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[2210112205@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210112205@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## *Abstract*

*This study aims to analyze the influence of integrity, independence, and professionalism on audit quality among auditors at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Representative Office of the Special Capital Region of Jakarta. The study employs a quantitative approach through a survey of 51 auditors and is analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that integrity has a positive and significant effect on audit quality, while independence does not exhibit a significant influence. Professionalism is proven to have a positive and significant effect on enhancing audit quality. These findings highlight that auditor integrity and professionalism are key factors in supporting the achievement of high-quality audits.*

**Keywords:** *Integrity, Independence, Professionalism, Audit Quality, and BPK.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada auditor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 51 auditor dan dianalisis dengan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Profesionalisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Temuan ini menegaskan bahwa aspek integritas dan profesionalisme auditor merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya kualitas audit yang baik.

**Kata kunci:** Integritas, Independensi, Profesionalisme, Kualitas Audit, dan BPK.

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen krusial dalam penyajian informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas, termasuk entitas pemerintahan, secara sistematis dan transparan. Dalam konteks *good governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang menjamin pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan efektif dan efisien (Sitorus et al., 2025). Menurut N. Wahyuni et al. (2025), akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sehingga menjadi prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, laporan keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus dasar bagi terbentuknya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Secara konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. BPK bersifat independen dan otonom, sehingga terbebas dari campur tangan pihak luar dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor eksternal (Amalyh et al., 2025). Sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas keuangan publik, BPK berperan mendeteksi penyalahgunaan anggaran, mengidentifikasi kelemahan sistem keuangan, serta meminimalkan potensi kerugian negara (Kaldera et al., 2020). Peran BPK juga melampaui pemberian rekomendasi tindak lanjut, yakni dengan menjadi saksi ahli dalam proses peradilan yang berkaitan dengan kerugian negara (Putri et al., 2025).

Menurut DeAngelo dalam Fadhlani et al. (2023), kualitas audit diartikan sebagai kapasitas auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan pelanggaran yang terdapat dalam sistem akuntansi klien, yang mencakup kompetensi teknis auditor dan independensi dalam melaksanakan tugas audit. Hasil audit yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran fundamental karena menjadi jaminan utama bagi publik bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dengan wajar dan tidak mengandung salah saji material. Dalam kerangka ini, kualitas audit bergantung pada kompetensi, independensi auditor, sistem pengendalian mutu, serta tindak lanjut terhadap temuan audit semua elemen ini saling terintegrasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Agusmansyah & Martani, 2022)

Dalam IHPS I Tahun 2024 hasil pemeriksaan BPK atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023 mengungkapkan opini WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, dengan demikian, secara keseluruhan sebanyak 80 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2023 memperoleh opini WTP (95%). Pada IHPS I Tahun 2024, di tahun ini BPK melaporkan sebanyak 9.910 temuan dari 738 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan nilai mencapai Rp 12,64 triliun. Dari jumlah tersebut, 7.055 permasalahan (42,7%) berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 99 permasalahan (0,6%) terkait dengan ketidakhematan dan ketidakefektifan, sedangkan 9.364 permasalahan (56,7%) berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (BPK RI, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa capaian opini WTP yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang bebas dari permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak semata-mata dinilai berdasarkan opini yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan auditor dalam mendeteksi kelemahan serta memberikan rekomendasi yang efektif bagi perbaikan tata kelola keuangan negara.

Audit sektor publik yang rendah kualitasnya menimbulkan berbagai konsekuensi serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Selain itu, inefisiensi anggaran menjadi lebih nyata karena lemahnya pengawasan dan tindak lanjut audit memungkinkan

pemborosan atau penyalahgunaan dana. Hal ini juga membuka celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan risiko yang berulang kali terbukti meningkat ketika kontrol internal dan fungsi audit tidak efektif (Purba & Hardi, 2020). Korupsi semacam ini berdampak buruk pada perekonomian secara makro, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, menciptakan distorsi pasar, dan memperlebar ketimpangan sosial (Cintana et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya ditentukan oleh sistem atau prosedur pemeriksaan, tetapi juga oleh kualitas moral dan etika individu auditor itu sendiri. Integritas merupakan prinsip etika yang paling mendasar bagi auditor dalam menjaga kualitas audit, karena integritas menuntut sikap jujur, lugas, dan terbuka dalam setiap hubungan profesional, serta keteguhan dalam menghadapi tekanan atau kepentingan pribadi yang dapat mengganggu objektivitas (Maulana, 2020). Namun, pada praktiknya masih terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan gangguan terhadap integritas auditor. Pada tahun 2023, adanya dugaan keterlibatan dua oknum pejabat BPK dalam praktik korupsi dengan modus 'jual-beli audit', yakni menawarkan opini audit tertentu dengan imbalan (Nugroho, 2023). Selain itu, terdapat kasus dari BPK Perwakilan Jawa Barat dengan adanya suap dari Bupati Bogor kepada oknum auditor, agar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan opini WTP (Ryn, 2022). Namun Paranoan et al. (2023) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara integritas dan kualitas audit, hal tersebut yang mengindikasikan bahwa tingginya integritas auditor tidak selalu menjamin peningkatan kualitas audit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pengaruh eksternal, seperti tekanan organisasi, campur tangan atasan, maupun situasi pemeriksaan yang kompleks, yang membuat auditor cenderung menyesuaikan sikap integritasnya dalam praktik.

Namun, integritas yang tinggi tidak akan berarti tanpa diimbangi dengan independensi yang kuat dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Secara teoritis, auditor sektor publik memiliki independensi finansial lebih kuat dibanding auditor privat karena tidak bergantung pada *fee auditee*. Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap independensi auditor BPK masih dapat terjadi. Tekanan dari pihak eksekutif maupun legislatif daerah dalam proses pemeriksaan berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas auditor. Independensi sendiri mencakup dua dimensi, yaitu *independence in fact* yang menunjukkan kejujuran dan kebebasan auditor dalam berpikir serta menilai bukti audit, dan *independence in appearance* yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap sikap independen auditor (Fauziyah, 2024). Jika kedua dimensi ini terganggu, kredibilitas opini audit dan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan BPK menjadi diragukan. Pada tahun 2023 terjadi kasus yang menimpa BPK Perwakilan Riau, ketika Meranti melakukan suap kepada oknum auditor BPK untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 (Siregar, 2023). Independensi auditor merupakan nilai dasar pemeriksa untuk menjaga kredibilitas opini dan kualitas audit. Temuan Lamba et al. (2020) melalui penelitian pada auditor pemerintah di Papua menegaskan bahwa independensi auditor memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Namun, integritas dan independensi saja belum cukup tanpa diimbangi oleh profesionalisme auditor yang memastikan audit dilakukan secara kompeten dan sesuai standar. Auditor yang profesional mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dari pendidikan formal maupun pelatihan intensif yang memungkinkan mereka melaksanakan audit secara efektif dan efisien, bahkan ketika menghadapi kompleksitas pemeriksaan yang tinggi (Sulaeman et al., 2024). Profesionalisme juga mencakup sikap tanggung jawab, ketelitian, dan komitmen terhadap standar pemeriksaan. Penerimaan suap oleh oknum auditor seperti dijelaskan sebelumnya juga bermakna bahwa auditor gagal dalam menegakkan kode etik profesi. Ketika profesionalisme terganggu oleh intervensi atau konflik kepentingan, kualitas audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan berpotensi

merugikan masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa lemahnya profesionalisme auditor tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil audit, tetapi juga dapat membuka ruang bagi praktik korupsi yang lebih meluas.

Sejumlah penelitian terdahulu seperti Mahdi et al. (2023), Cahya (2025), Kusuma (2021), Hanun & Setiawati (2025) dan Defitri et al. (2022) telah meneliti terkait pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Namun, temuan penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam, sehingga masih membuka ruang untuk pengujian lebih lanjut, khususnya pada auditor sektor publik. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada auditor internal pemerintah (APIP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP), sementara kajian yang meneliti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, masih relatif terbatas. Berbagai kasus yang melibatkan auditor BPK, mulai dari praktik suap hingga pengkondisian opini audit. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat BPK merupakan lembaga yang dipercaya publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah menunjukkan persentase yang tinggi, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam IHPS mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan sektor publik masih menghadapi berbagai permasalahan.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas audit tidak hanya bergantung pada hasil pemeriksaan, tetapi juga pada karakter, integritas, independensi, dan profesionalisme auditor yang menjalankannya. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipilih menjadi objek dalam penelitian ini karena memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan di wilayah dengan kompleksitas fiskal tertinggi dan nilai anggaran terbesar di Indonesia. Signifikansi nilai anggaran tersebut menuntut auditor memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi agar mampu menghasilkan kualitas audit yang andal dan berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana integritas, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Teori agensi dikenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), teori ini mendeskripsikan tentang hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik saham) dengan *agent* (pihak yang diberi wewenang). Teori ini menekankan adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi, ini dikarenakan *agent* mempunyai aksesibilitas akan informasi yang lebih banyak mengenai kondisi organisasi dibandingkan *principal*. Masalah agensi timbul ketika *agent* lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan *principal* (Eisenhardt, 1989). Situasi ini diperburuk oleh asimetri informasi, yaitu kondisi ketika *principal* tidak memiliki pengetahuan penuh mengenai kondisi perusahaan atau keuangan yang sebenarnya, sehingga menciptakan ruang bagi *agent* untuk bertindak oportunistik. Dalam konteks audit sektor publik, auditor BPK berperan sebagai pihak ketiga independen yang membantu meyakinkan *principal* atau masyarakat bahwa laporan keuangan yang telah dibuat *agent* atau pemerintah telah berdasarkan prinsip akuntansi dan bebas dari kecurangan. Dengan demikian, keberadaan auditor yang berkualitas mampu menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa guna menjaga dan melindungi kepercayaan publik (Sanjaya, 2016), dan menjadi opsi untuk meminimalisir *agency problem*. Dengan adanya risiko konflik kepentingan dan asimetri informasi, kualitas audit menjadi faktor penting untuk menjaga kepentingan *principal*. Auditor dituntut untuk memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme agar dapat

melaksanakan audit secara objektif dan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam mengurangi *agency problem* dan memastikan kualitas audit yang dihasilkan dapat memenuhi harapan *principal*.

### **Teori Atribusi**

Fritz Heider dalam Syahrir (2022), menjelaskan bahwa teori atribusi ialah perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi sikap, sifat, dan karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau situasi tertentu yang memengaruhi perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara perilaku, sikap, dan karakter individu, sehingga melalui perilaku dapat dipahami sikap seseorang serta tindakannya dalam situasi tertentu. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, dan pada dasarnya perilaku auditor berperan penting dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan (Saifudin et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor internal seorang auditor memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Faktor internal tersebut diwujudkan melalui integritas, independensi, dan profesionalisme yang melekat dalam diri auditor. Dengan demikian, teori atribusi ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan bagaimana perilaku auditor yang dipengaruhi faktor internal. Dalam penelitian ini variabel integritas, independensi, dan profesionalisme auditor diduga memengaruhi tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

### **Kualitas Audit**

Secara konseptual, kualitas audit merupakan peluang bagi auditor untuk mendeteksi dan menyampaikan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi klien. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit dapat diartikan sebagai kombinasi antara kapasitas auditor dalam mengidentifikasi kesalahan (*competence*) serta keberanian auditor untuk mengungkapkannya (*independence*). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) menetapkan bahwa audit berkualitas harus dilakukan secara profesional, dengan integritas, independen, dan melibatkan pertimbangan profesional yang tepat dalam proses pemeriksaan. Menurut Badewin et al. (2025) kualitas audit yang baik mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi lembaga publik. Jika kualitas audit rendah, opini yang diberikan auditor bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan, mengurangi kepercayaan publik, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kualitas audit yang buruk juga dapat merusak citra dan legitimasi BPK sebagai lembaga pemeriksa negara. Dalam mengukur kualitas audit maka diperlukan indikator. Menurut Martono dalam Sisworini (2024) indikator tersebut yang mencakup proses perencanaan audit, proses pelaksanaan audit, dan hasil dari laporan audit. Indikator ini selaras dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) yang menekankan audit yang tepat waktu, akurat, objektif, dan lengkap. Indikator-indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana audit dilakukan secara profesional dan objektif, sehingga opini yang dihasilkan dapat dipercaya (R. P. Sihombing, 2023).

### **Integritas**

Integritas ialah prinsip etika yang menjadi landasan utama profesi auditor. Integritas menuntut auditor untuk bersikap jujur, tegas, dan konsisten ketika melaksanakan tugas sesuai aturan dan standar profesi yang berlaku. INTOSAI (2019), menjelaskan bahwa integritas adalah salah satu nilai dasar yang wajib dimiliki auditor negara karena tanpa integritas, auditor mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat menurunkan kualitas hasil audit. Namun

menurut Mahdi et al. (2023), pengaruh tersebut dapat melemah bila terdapat tekanan politik yang signifikan. Sulaeman et al. (2024) juga mengatakan integritas auditor dapat memperkuat hubungan kompetensi, profesionalisme, dan independensi pada kualitas audit, karena auditor yang berintegritas akan lebih konsisten dalam menerapkan standar audit meskipun menghadapi dilema etis. Untuk mengukur integritas auditor, sejumlah indikator sering digunakan dalam penelitian terdahulu. Muslim et al. (2020) mengemukakan bahwa integritas tercermin dari kejujuran auditor dalam menyampaikan temuan audit, keberanian dalam melaporkan pelanggaran meskipun menghadapi risiko, bijaksana serta tanggung jawab dalam menjalankan standar profesi. Sementara itu, Alsughayer (2021) mengatakan elemen yang memengaruhi kualitas audit terkait integritas adalah bagaimana auditor melaksanakan tugas auditnya dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, ketekunan, kewajaran, dan objektivitas. Integritas dalam peraturan BPK RI (2018), menanamkan nilai kejujuran, objektivitas, dan ketegasan dalam menjalankan prinsip, nilai, serta pengambilan keputusan. Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengukur sejauh mana auditor memegang prinsip integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

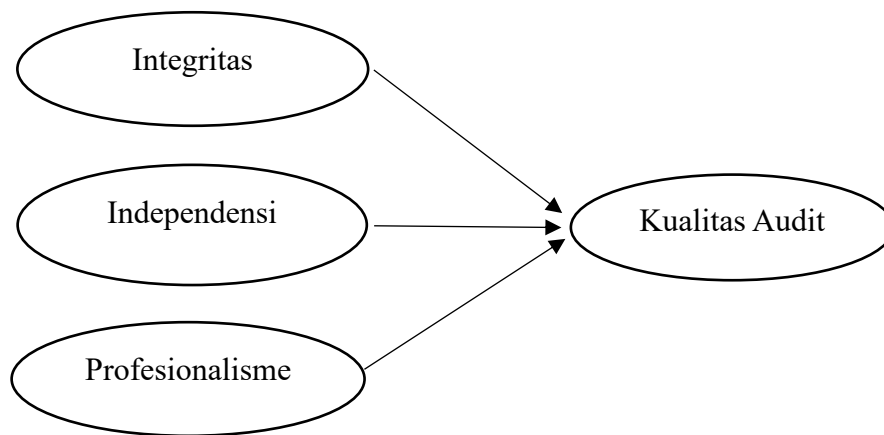
## **Independensi**

Independensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk menjaga sikap mental yang objektif serta bebas dari keberpihakan terhadap kepentingan klien dalam melaksanakan pemeriksaan, menilai hasil, dan memberikan pengesahan dalam laporan audit (Mulyani & Munthe, 2019). Demikian pula, (SPKN, 2017) mewajibkan auditor BPK untuk bersikap independen agar laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memiliki legitimasi di mata publik. Independensi memiliki dua dimensi penting, yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* mengacu pada kejujuran serta kebebasan berpikir auditor dalam menilai fakta dan bukti audit, sedangkan *independence in appearance* berkaitan dengan persepsi publik bahwa auditor bertindak bebas dan tidak memihak (Fikri & Galib, 2022). Kedua dimensi ini saling melengkapi untuk menjaga kredibilitas hasil audit dan kepercayaan publik. Menurut Kurniawan (2023), meskipun kompleksitas dalam menjaga independensi, para pemangku kepentingan mengakui pentingnya intervensi regulasi, pedoman etis, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjaga independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit. Independensi memiliki beberapa indikator, di dalam penelitian Kusumawardani & Riduwan (2017) indikator independensi yaitu hubungan dengan klien, adanya tekanan dari klien, besaran honorarium audit, durasi penugasan, serta fasilitas tambahan yang diberikan oleh klien. Penelitian Sulaeman et al. (2024) dan (Dinda & Annisa, 2024) independensi diukur dari penyusunan program audit, pelaksanaan verifikasi, dan pelaporan, yang semuanya harus dijaga untuk keberhasilan audit. Dalam peraturan BPK RI (2018), setiap kegiatan pemeriksaan, pemeriksa harus bersikap bebas, baik secara mental maupun dalam penampilan, dari segala bentuk gangguan pribadi, eksternal, maupun organisasi yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya.

## **Profesionalisme**

Profesionalisme auditor mencakup tiga aspek penting: kompetensi, kehati-hatian (*due care*), dan ketaatan terhadap standar profesi. Seorang auditor yang profesional diharuskan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dari pendidikan formal maupun pelatihan intensif yang memungkinkan mereka melaksanakan audit secara efektif dan efisien, bahkan ketika menghadapi kompleksitas pemeriksaan yang tinggi (Sulaeman et al., 2024). Ketaatan pada standar profesi seperti kode etik dan standar audit yang berlaku menjamin

bahwa auditor tidak hanya kompeten dan berhati-hati, tetapi juga konsisten menjunjung integritas, objektivitas, rahasia, dan perilaku profesional lainnya (Wahyuni & Rizal, 2022). Arens dalam Natalina et al. (2022) mengatakan bahwa profesionalisme bukan sekadar memenuhi kewajiban pribadi atau aturan hukum, tetapi merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Untuk mengukur profesionalisme auditor, beberapa penelitian Susilo dan Widyastuti dalam Sulaeman et al. (2024), Kusuma (2021), Sisworini (2024) menyebutkan indikator utama yaitu, kemandirian mencerminkan kemampuan auditor dalam mengambil keputusan secara objektif, sementara pengabdian terhadap profesi menunjukkan komitmen dan dedikasi auditor dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban sosial menggambarkan kesadaran auditor bahwa profesinya dijalankan untuk kepentingan publik. Selain itu, profesionalisme juga tercermin dari kemampuan auditor menjalin hubungan kerja yang baik dengan sesama auditor serta keyakinan terhadap aturan profesi yang diwujudkan melalui kepatuhan pada regulasi dan standar profesi yang berlaku. Dengan demikian, profesionalisme auditor merupakan kombinasi dari sikap, keahlian, serta komitmen yang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, adaptasi teknologi, dan penelitian terbaru sehingga dapat meningkatkan kualitas audit sekaligus menjaga kepercayaan publik.



Sumber : Data Diolah 2025

Gambar 1. Model Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H3: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka yang diperoleh melalui kuesioner. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur variabel integritas, independensi, profesionalisme, dan kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 51 auditor yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian

terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS, yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten serta mengukur pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian difokuskan pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta beserta entitas terkait. Struktur organisasi BPK Perwakilan DKJ terdiri atas Kepala Perwakilan, Subpemeriksaan/Bidang Pemeriksaan DKJ I sampai DKJ IV, Seksi Pemeriksaan, serta Bagian Umum dan Tata Usaha. Berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), organisasi pemeriksaan melibatkan Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yang menjalankan peran sebagai penanggung jawab, pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim pemeriksa. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada pemeriksa BPK DKJ pada 11–30 November 2025, dengan jumlah responden yang dapat diolah sebanyak 51 orang dari total 53 responden yang masuk.

### Deskripsi Responden

Responden penelitian merupakan pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan karakteristik jabatan, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja yang beragam. Berdasarkan jabatan, mayoritas responden merupakan Pemeriksa Ahli Muda/Muda (61%), diikuti Pemeriksa Ahli Madya dan Pertama masing-masing sebesar 18%, serta sebagian kecil berasal dari jabatan struktural. Dari sisi jenis kelamin, komposisi responden relatif seimbang antara perempuan (51%) dan laki-laki (49%). Berdasarkan usia, responden didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun (47%) dan di atas 50 tahun (31%), yang menunjukkan tingkat kematangan profesional yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun (80%), mencerminkan bahwa penelitian ini didukung oleh responden dengan tingkat senioritas dan pengalaman audit yang memadai.

### Distribusi Frekuensi Variabel Sebelum Eliminasi

Analisis distribusi frekuensi sebelum eliminasi menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian tinggi terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu kualitas audit, integritas, independensi, dan profesionalisme. Mayoritas jawaban terkonsentrasi pada kategori *setuju* dan *sangat setuju*, dengan nilai rata-rata keseluruhan masing-masing variabel berada di atas 4,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki persepsi positif terhadap praktik audit yang dijalankan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan tindak lanjut audit. Pada variabel kualitas audit sebelum eliminasi, nilai mean sebesar 4,37 menunjukkan bahwa kualitas audit dipersepsikan tinggi oleh responden. Pemeriksa dinilai telah melaksanakan perencanaan audit secara sistematis dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan sesuai SPKN, melaksanakan audit dengan pengumpulan bukti yang optimal, kepatuhan terhadap kode etik, serta kehati-hatian profesional, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan

secara objektif, lengkap, serta konstruktif. Meskipun terdapat sedikit variasi jawaban pada beberapa item, khususnya terkait penyelesaian permasalahan hingga akhir pemeriksaan, secara umum kualitas audit berada pada kategori tinggi.

Variabel integritas sebelum eliminasi memperoleh nilai mean sebesar 4,41 yang mencerminkan tingkat integritas pemeriksa yang tinggi. Responden menilai bahwa pemeriksa bekerja secara jujur, tidak menerima fasilitas dari pihak terkait, berani mengambil keputusan dengan pertimbangan profesional, bersikap bijaksana tanpa memaksakan kehendak pribadi, serta bertanggung jawab atas hasil pemeriksaannya. Demikian pula, variabel independensi dan profesionalisme sebelum eliminasi menunjukkan nilai mean masing-masing sebesar 4,24 dan 4,28. Meskipun terdapat variasi jawaban pada beberapa indikator independensi, khususnya terkait potensi gangguan organisasi, secara keseluruhan pemeriksa tetap dipersepsikan independen, profesional, dan objektif dalam menjalankan tugasnya.

### **Distribusi Frekuensi Variabel Sesudah Eliminasi**

Setelah dilakukan pengujian *outer model*, sejumlah item dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria *outer loading* minimum atau untuk menyesuaikan nilai *composite reliability* yang berlebih. Eliminasi ini tidak mengubah makna konstruk, karena item yang dipertahankan tetap merepresentasikan indikator utama masing-masing variabel. Hasil distribusi frekuensi setelah eliminasi justru menunjukkan konsistensi persepsi responden dengan nilai rata-rata yang tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat pada beberapa variabel. Variabel kualitas audit setelah eliminasi memiliki nilai mean sebesar 4,41, yang menunjukkan persepsi sangat positif terhadap kualitas pemeriksaan. Item yang dipertahankan merefleksikan perencanaan audit yang baik, pelaksanaan audit yang patuh etika dan berbasis bukti, serta hasil audit yang akurat, objektif, dan bermanfaat. Variabel integritas setelah eliminasi juga menunjukkan nilai mean tinggi sebesar 4,40, yang menegaskan bahwa pemeriksa menjalankan tugas dengan kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang kuat.

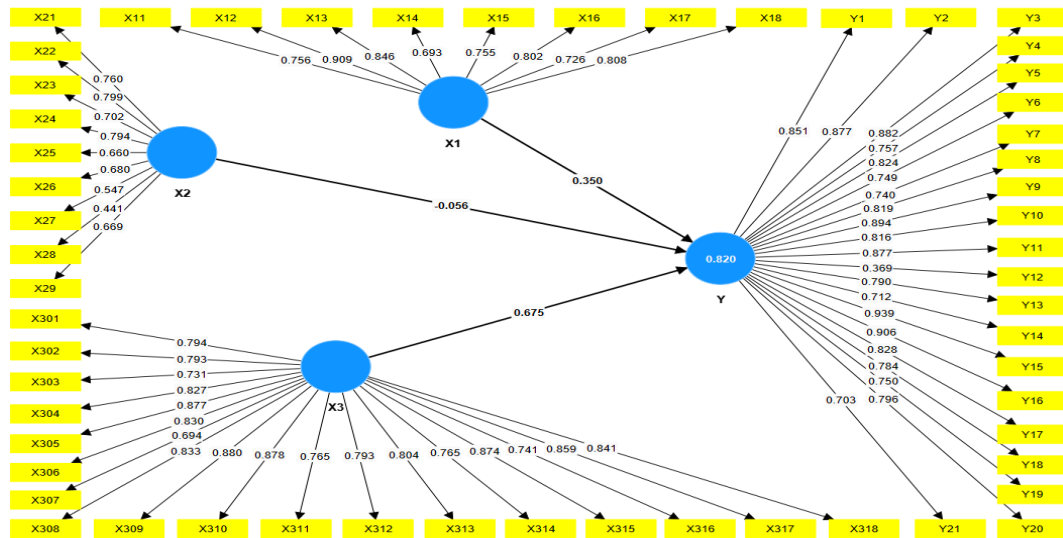
Selanjutnya, variabel independensi dan profesionalisme setelah eliminasi masing-masing memperoleh nilai mean sebesar 4,32 dan 4,20. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksa secara umum mampu menjaga independensi pribadi dan eksternal, meskipun masih terdapat persepsi minor terkait potensi pengaruh struktural organisasi. Profesionalisme pemeriksa tercermin melalui kemampuan bekerja mandiri, komitmen peningkatan kompetensi, kesadaran akan peran sosial profesi, kerja sama dengan rekan seprofesi, serta pengambilan keputusan audit berdasarkan fakta dan bukti. Secara keseluruhan, distribusi frekuensi sebelum dan sesudah eliminasi menegaskan bahwa konstruk penelitian stabil, reliabel, dan mencerminkan praktik audit yang berkualitas pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

### **Uji Statistik Deskriptif**

Hasil uji statistik deskriptif setelah eliminasi indikator menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 4,00, yang mengindikasikan persepsi responden berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Variabel integritas, profesionalisme, dan kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 2, yang menunjukkan tidak adanya responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju, serta mayoritas jawaban terkonsentrasi pada rentang nilai 3–5. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel kualitas audit (4,41), diikuti integritas (4,40) dan profesionalisme (4,20), yang mencerminkan persepsi positif dan relatif homogen terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Sementara itu, variabel independensi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,32 dengan nilai minimum 1, yang menunjukkan adanya variasi persepsi responden dibandingkan variabel lainnya. Meskipun demikian, mayoritas responden tetap memberikan penilaian setuju dan sangat setuju, sehingga independensi pemeriksa secara umum berada pada kategori tinggi. Variasi penilaian ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap independensi lebih dipengaruhi oleh konteks dan

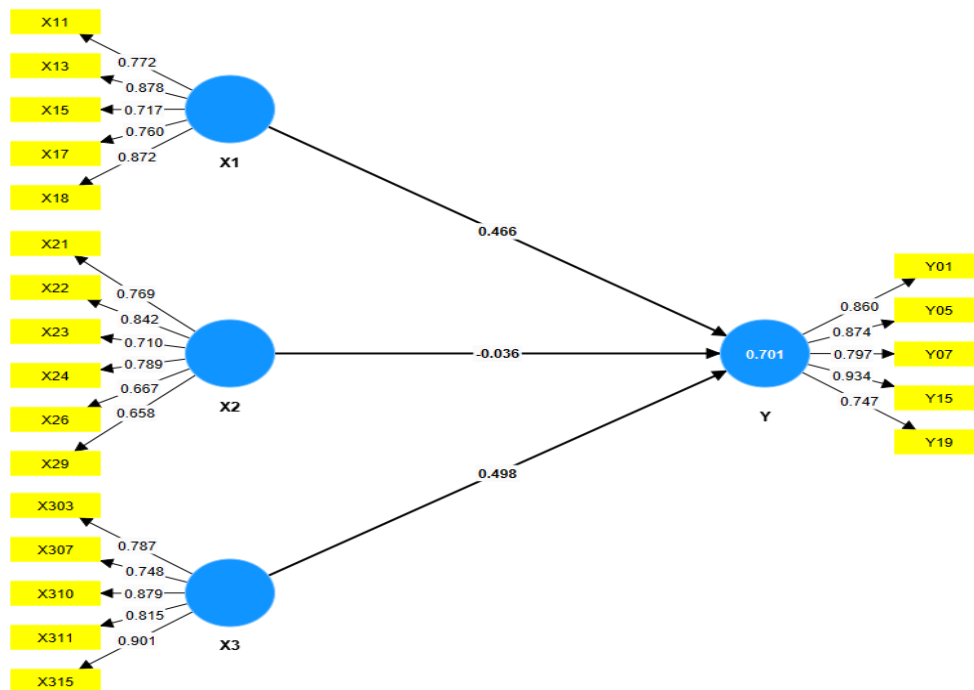
pengalaman pemeriksaan di lapangan, meskipun standar dan ketentuan yang mengatur independensi telah ditetapkan secara seragam.

### Uji Validitas Konvergen



Gambar 2. Model Pengukuran Awal

Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian nilai outer loading dan reliabilitas konstruk. Mengacu pada (Chin, 1998), indikator dengan nilai outer loading  $\geq 0,60$  dinyatakan layak, sementara indikator di bawah batas tersebut dieliminasi karena tidak merepresentasikan konstruk secara optimal. Selain itu, eliminasi juga dilakukan ketika nilai composite reliability melebihi 0,95 sebagaimana dijelaskan oleh (Hair et al., 2021), karena kondisi tersebut mengindikasikan redundansi indikator atau item yang terlalu mirip (item duplication). Berdasarkan hasil pengujian awal, beberapa indikator dieliminasi untuk meningkatkan validitas konvergen dan memastikan setiap konstruk diukur secara proporsional.



Gambar 3. Model Pengukuran Setelah Eliminasi

Hasil pengujian setelah eliminasi menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,60, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan pada tahap pengujian berikutnya. Pada variabel integritas, indikator dengan kontribusi tertinggi adalah X13, sedangkan pada variabel independensi indikator terkuat adalah X22. Variabel profesionalisme paling kuat direpresentasikan oleh indikator X315, dan pada variabel kualitas audit indikator Y15 menjadi indikator dominan. Meskipun terdapat indikator dengan kontribusi relatif lebih rendah pada masing-masing variabel, seluruhnya tetap memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, model pengukuran setelah eliminasi telah memenuhi persyaratan statistik dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian secara akurat dan andal. Kemudian berdasarkan *Average Variance Extracted (AVE)* juga menunjukkan korelasi indikator (item pengukuran) dengan variabel.

**Tabel 1. Hasil *Average Variance Extracted (AVE)***

Variabel	AVE
Integritas	0.644
Independensi	0.551
Profesionalisme	0.685
Kualitas Audit	0.714

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*, seluruh variabel penelitian memiliki nilai  $AVE \geq 0,50$ , sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Variabel Integritas memiliki nilai AVE sebesar 0,644, Independensi sebesar 0,551, Profesionalisme sebesar 0,685, dan Kualitas Audit sebesar 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% variasi indikator pada masing-masing variabel dapat dijelaskan oleh konstruk laten yang diukur. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel Integritas, Independensi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian dengan baik.

### Uji Validitas Diskriminasi

**Tabel 2. Hasil *Cross Loading***

Korelasi	X1	X2	X3	Y
X11	<b>0.772</b>	0.516	0.477	0.599
X13	<b>0.878</b>	0.542	0.480	0.616
X15	<b>0.717</b>	0.550	0.431	0.631
X17	<b>0.760</b>	0.527	0.513	0.507
X18	<b>0.872</b>	0.637	0.542	0.609
X21	0.569	<b>0.769</b>	0.651	0.501
X22	0.598	<b>0.842</b>	0.673	0.578
X23	0.482	<b>0.710</b>	0.407	0.481
X24	0.507	<b>0.789</b>	0.495	0.449
X26	0.502	<b>0.667</b>	0.392	0.398
X29	0.391	<b>0.658</b>	0.266	0.291
X303	0.560	0.730	<b>0.787</b>	0.599
X307	0.400	0.550	<b>0.748</b>	0.525
X310	0.424	0.533	<b>0.879</b>	0.649

<b>X311</b>	0.559	0.472	<b>0.815</b>	0.637
<b>X315</b>	0.566	0.533	<b>0.901</b>	0.706
<b>Y01</b>	0.675	0.578	0.559	<b>0.860</b>
<b>Y05</b>	0.712	0.555	0.698	<b>0.874</b>
<b>Y07</b>	0.573	0.361	0.439	<b>0.797</b>
<b>Y15</b>	0.715	0.612	0.769	<b>0.934</b>
<b>Y19</b>	0.427	0.487	0.687	<b>0.747</b>

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil *cross loading*, seluruh indikator menunjukkan nilai korelasi tertinggi pada variabel konstraknya masing-masing dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item pengukuran memiliki kemampuan diskriminatif yang baik dalam merepresentasikan konstruk yang diukur. Sebagai contoh, indikator X11 memiliki korelasi tertinggi dengan variabel Integritas dibandingkan dengan Independensi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit. Demikian pula, indikator X21 menunjukkan korelasi tertinggi pada variabel Independensi, sementara indikator X301 paling kuat berkorelasi dengan variabel Profesionalisme, dan indikator Y01 memiliki korelasi tertinggi pada variabel Kualitas Audit. Kondisi ini juga terjadi pada indikator-indikator lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3. Hasil Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability (rho c)
Integritas	0.860	0.900
Independensi	0.836	0.879
Profesionalisme	0.884	0.916
Kualitas Audit	0.898	0.925

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel. Nilai *composite reliability* masing-masing variabel berada dalam rentang yang disyaratkan, yaitu di atas 0,60 dan tidak melebihi 0,95, sehingga menunjukkan bahwa indikator-indikator mampu merepresentasikan konstruk secara konsisten (Hair et al., 2021). Hasil uji *Cronbach's Alpha* juga memperkuat temuan tersebut, di mana seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,60. Dengan demikian, variabel Integritas, Independensi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit dapat dinyatakan memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

### Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

**Tabel 4. Hasil Uji R-Square**

Variabel	R-Square	R-Square adjusted
Kualitas Audit	0.701	0.682

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian model struktural, nilai *R-Square* untuk variabel Kualitas Audit sebesar 0,701, sedangkan nilai *R-Square adjusted* tercatat 0,682. Nilai ini menunjukkan

bahwa variabel integritas, independensi dan profesionalisme dalam penelitian mampu menjelaskan sekitar 68,2% variasi pada variabel Kualitas Audit, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti. Mengacu pada pedoman (Hair et al., 2021), nilai tersebut berada pada kategori cukup kuat, sehingga model dapat dinilai memiliki daya jelaskan yang baik.

## Uji Hipotesis

**Tabel 5. Hasil Uji *Path Coefficients***

<b>Pengaruh Variabel</b>	<b><i>Original Sample</i></b>	<b><i>Sample Mean</i></b>	<b><i>Standar Deviation</i></b>	<b><i>T-statistics</i></b>	<b><i>P-Value</i></b>
INT → KA	0.466	0.467	0.134	3.479	0.000
IND → KA	-0.036	-0.030	0.140	0.259	0.398
PRO → KA	0.498	0.490	0.160	3.115	0.001

Sumber: Data diolah (2025)

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *t-statistic*, *p-value*, dan arah koefisien jalur (*path coefficients*). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistic* > 1,96. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien sebesar 0,466, *t-statistic* 3,479, dan *p-value* 0,000, sehingga H1 diterima. Sebaliknya, independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0,036, *t-statistic* 0,259, dan *p-value* 0,398, yang tidak memenuhi kriteria signifikansi, sehingga H2 ditolak. Sementara itu, profesionalisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien 0,498, *t-statistic* 3,115, dan *p-value* 0,001. Dengan demikian, H3 diterima. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas audit dalam model penelitian ini.

## Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Pengujian hipotesis dibuktikan oleh nilai *t-statistic* 3.479 > 1.96, *p-value* 0.000 < 0.05, dan koefisien positif 0.466. Dengan demikian integritas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga hipotesis **H1 diterima**. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis deskriptif, di mana indikator integritas memperoleh skor rata-rata yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara umum dinilai memiliki kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Hasil ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya Andi Hardianti et al. (2022), Wati et al. (2024), Murdiawati (2025) ketiganya meneliti pada lembaga sektor publik dan menyimpulkan bahwa integritas pemeriksa berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, di mana pemeriksa dengan tingkat kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi cenderung menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan menjadikan integritas sebagai determinan penting dalam meningkatkan kualitas audit.

Dari perspektif teori atribusi, integritas merupakan faktor disposisional yang melekat pada diri pemeriksa. Dalam *agency theory*, integritas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku *agent* yang menghadapi asimetri informasi. Karena itu, hubungan positif antara integritas dan kualitas audit secara logis sesuai dengan peran pemeriksa sebagai penjaga kepentingan *principal*. Kaitan dengan konteks sektor publik, khususnya BPK, juga sangat relevan. BPK memiliki kode etik yang ketat serta ditopang oleh budaya organisasi yang menekankan perilaku berintegritas, anti-korupsi, dan independensi moral. Proses rekrutmen,

pelatihan, dan pengawasan internal BPK secara sistematis membentuk pemeriksa dengan karakter integritas tinggi. Ketika pemeriksa bekerja dalam lingkungan yang sangat menekankan nilai-nilai tersebut, integritas menjadi faktor internal yang kuat dalam memengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara logis memperlihatkan bahwa integritas menjadi salah satu faktor dominan dalam menjelaskan kualitas audit pada BPK Perwakilan Daerah Khusus Jakarta.

### **Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar  $0,259 < 1,96$  dan *p-value*  $0,398 > 0,05$ , dengan arah koefisien negatif ( $-0,036$ ). Dengan demikian, variabel independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga hipotesis **H2 ditolak**. Temuan ini dapat dilihat juga dari hasil sebaran kuesioner yang meskipun mayoritas menyatakan setuju pada pernyataan “Pemeriksaan audit bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dipilih pemeriksa”, namun masih terdapat responden yang merasakan akan potensi intervensi pimpinan dalam proses pemeriksaan. Meskipun demikian, potensi intervensi pimpinan sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK, di mana pimpinan hanya berwenang pada aspek perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya, namun tidak diperkenankan memodifikasi ruang lingkup teknis pemeriksaan, menentukan temuan, maupun mengubah kesimpulan pemeriksa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fachruddin et al. (2022) meneliti pemeriksa sektor publik dan menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan karena independensi merupakan kekuatan eksternal (*external force*) yang membentuk sikap pemeriksa, bukan kompetensi teknis yang langsung memengaruhi hasil audit. Temuan Rasuli et al. (2024) juga menemukan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, menurutnya hal ini karena pengukuran independensi pemeriksa tidak diturunkan dari sikap mental pemeriksa itu sendiri, dan sebaiknya diwakili oleh empat sub-variabel, yaitu: (a) lama hubungan dengan klien, (b) tekanan dari klien, (c) review dari sesama pemeriksa, dan (d) layanan non-audit.

Independensi pemeriksa merupakan sikap mental yang mencerminkan objektivitas, namun tidak selalu tercermin langsung dalam tindakan teknis pemeriksaan. Kualitas audit lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar, kemampuan teknis, penguasaan prosedur, dan ketelitian pelaksanaan audit. Dalam teori atribusi, independensi dikategorikan sebagai faktor situasional yang dibentuk oleh struktur organisasi dan regulasi. Ketika pemeriksa bekerja dalam sistem yang sama dan ketat, variasi independensi personal menjadi kecil sehingga tidak cukup kuat menjelaskan perbedaan kualitas audit. Dari perspektif agency theory, independensi berfungsi mencegah moral hazard melalui pengawasan objektif, namun karena telah dilembagakan secara struktural dan bersifat homogen, pengaruhnya tidak tampak signifikan secara statistik. Dengan demikian, independensi berperan sebagai prinsip etis pendukung, bukan determinan utama kualitas audit. Dalam konteks BPK, kualitas audit dijaga melalui perangkat formal seperti SPKN, pedoman pemeriksaan, serta sistem pengendalian mutu internal yang ketat. Mekanisme supervisi berlapis dan kepatuhan prosedural memastikan konsistensi hasil audit, sehingga kualitas audit lebih merefleksikan kepatuhan sistem daripada kondisi psikologis individual pemeriksa.

### **Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai *t-statistic*  $3,115 > 1,96$ , *p-value*  $0,001 < 0,05$ , dan koefisien positif  $0,498$ . Dengan demikian profesionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah

Khusus Jakarta, sehingga hipotesis **H3 diterima**. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis deskriptif, di mana indikator profesionalisme memperoleh skor rata-rata tertinggi dibanding variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara umum dinilai memiliki kemandirian, pengabdian pada profesi, pemenuhan kewajiban sosial, hubungan yang baik dengan rekan seprofesi, serta keyakinan terhadap aturan profesi, sehingga mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas.

Hasil ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya, M. Y. Sihombing et al. (2023), Fazmi et al. (2022), Budiman (2023) yang menyimpulkan bahwa profesionalisme pemeriksa secara signifikan meningkatkan kualitas audit sektor publik, terutama melalui penerapan skeptisisme profesional, kehati-hatian, objektivitas, dan kepatuhan pada kode etik. Pemeriksa dengan kompetensi teknis dan komitmen profesional yang tinggi cenderung menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan andal. Dalam perspektif teori atribusi, profesionalisme merupakan faktor disposisional yang bersumber dari kompetensi, pengalaman, dan komitmen individu terhadap standar profesi, sehingga berkontribusi langsung pada ketelitian prosedur audit. Sementara itu, dalam *agency theory*, profesionalisme memperkuat peran pemeriksa sebagai mekanisme monitoring dengan mengurangi asimetri informasi melalui pengumpulan bukti yang lebih akurat dan penilaian risiko yang tepat. Dalam konteks BPK, profesionalisme diperkuat oleh standar profesi yang ketat serta program pengembangan kapasitas berkelanjutan, menjadikannya faktor internal dominan dalam menjelaskan kualitas audit.

Kaitan dengan konteks sektor publik, khususnya BPK, juga sangat relevan. BPK memiliki standar profesi yang ketat serta ditopang oleh berbagai program pengembangan kapasitas pemeriksa seperti Pendidikan dan pelatihan teknis, *Knowledge Transfer Forum* (KTF), workshop persiapan pemeriksaan, dan sertifikasi pemeriksa. Proses ini secara sistematis membentuk pemeriksa dengan kemampuan teknis yang memadai untuk menjalankan prosedur audit secara efektif dan efisien, menerapkan standar pemeriksaan dengan konsisten, serta memahami pedoman audit secara mendalam. Mengingat kompleksitas entitas pemerintah, variasi jenis pemeriksaan (keuangan, kinerja, PDTT), serta tingginya harapan publik terhadap akuntabilitas, profesionalisme menjadi sangat vital di lingkungan BPK. Ketika pemeriksa bekerja dalam sistem yang menuntut kepatuhan prosedural dan pengendalian mutu berlapis, profesionalisme menjadi faktor internal yang kuat dalam memengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara logis memperlihatkan bahwa profesionalisme menjadi salah satu faktor dominan dalam menjelaskan kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan melibatkan 51 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), dapat disimpulkan bahwa integritas dan profesionalisme pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pemeriksa yang memiliki integritas tinggi serta profesionalisme yang baik cenderung mampu melaksanakan proses audit secara objektif, cermat, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan kualitas audit yang kredibel dan dapat dipercaya. Sementara itu, independensi pemeriksa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa independensi telah menjadi bagian yang melekat dalam sistem kelembagaan BPK melalui standar, pedoman, dan mekanisme pengendalian internal yang kuat, sehingga tingkat independensi pemeriksa relatif seragam dan tidak lagi menjadi faktor pembeda dalam menentukan kualitas audit. Dengan demikian, peningkatan kualitas

audit sektor publik lebih ditentukan oleh penguatan nilai integritas dan profesionalisme individu pemeriksa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup variabel yang digunakan, di mana kualitas audit hanya diukur berdasarkan integritas, independensi, dan profesionalisme pemeriksa. Padahal, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi, due professional care, skeptisisme profesional, pengalaman kerja, dan sistem pengendalian mutu pemeriksaan. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada ketersediaan instrumen pengukuran yang terstandarisasi dalam konteks audit sektor publik, sehingga indikator penelitian disesuaikan dari penelitian terdahulu.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan sesuai SPKN serta mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih spesifik untuk audit sektor publik. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penguatan nilai integritas dan profesionalisme pemeriksa perlu terus dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas audit dan menjaga kepercayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusmansyah, & Martani, D. (2022). Evaluation of Quality Control System on Audit Performance (Case Study of BPK Representative of West Sulawesi Province). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 20758–20768. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6095>
- Alsughayer, S. A. (2021). Impact of Auditor Competence, Integrity, and Ethics on Audit Quality in Saudi Arabia. *Open Journal of Accounting*, 10(04), 125–140. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2021.104011>
- Amalyh, C. F. S. N. A., Firnanda, I., Putri, M. R., Rahmaleni, W., Al Anffa, & Hadji, K. (2025). Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(1), 169–178. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i01.938>
- Andi Hardianti, Alimuddin, & Syamsuddin. (2022). The Effect Of Work Experience, Integrity, And Competence Of Auditors On Audit Quality With Emotional Intelligence As A Moderating Variable (Case Study on Bpkp South Sulawesi Province). *International Journal of Social Science*, 1(5), 799–808. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1325>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- BPK RI. (2018). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*.
- BPK RI. (2024). *Semester I Tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Budiman, A. (2023). Investigating the Impact of Auditor Independence, Professionalism, Competence, and Ethics on Audit Quality in the Inspectorate of West Java Province. *Jurnal AJIB (Audit Pajak Akuntansi Publik)*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/ajib.2023.2.1.2437>
- Cahya, D. E. (2025). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Integritas, dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Audit Sebagai Pemoderasi. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 05(01), 206–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jamek.v5i1.1547>
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. [https://www.researchgate.net/publication/311766005\\_The\\_Partial\\_Least\\_Squares\\_Approach\\_to\\_Structural\\_Equation\\_Modeling](https://www.researchgate.net/publication/311766005_The_Partial_Least_Squares_Approach_to_Structural_Equation_Modeling)
- Cintana, D., Salsa Haidillah, A., Alia Zulfa, S., Aprilisha Muhadi, A., & Khodijah, S. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional ARTICLE INFO ABSTRACT. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 12–18.

- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Defitri, S. Y., Sukraini, J., & Irawani, Y. (2022). Pengaruh Independensi, Integritas Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit. *JAM-EKIS*, 5(1), 15–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v5i1.2865>
- Dinda, R., & Annisa. (2024). Pengaruh Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 14, Issue 1). <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Fachruddin, W., Sari, E. P., & Saraswati, D. (2022). The Effect of Independence and Competence on Audit Quality at the BPKP Representative of North Sumatra Province. *Accounting and Bussiness Journal*, 4(2), 148–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.54248/abj.v4i2.4622>
- Fadhlan, I., Anisma, Y., & Silalahi, S. P. (2023). Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.49-61>
- Fauziyah, T. R. (2024). Ketika Independensi Menjadi Tolak Ukur Kualitas Audit. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i1.2269>
- Fazmi, A., Widiyanti, M., Yusuf, M., & Perizade, B. (2022). The influence of career, experience, and professionalism on audit quality at the audit board of the Republic of Indonesia representative of South Sumatera Province. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 10(1), 10–24. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v10n1.2259>
- Fikri, A. A., & Galib, S. (2022). Pengaruh Red Flags, Independensi, Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud : Studi Empiris Pada KAP di Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 379–392. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1420>
- Hair, J. F., Tomas M Hultt, G., M. Ringle, C., Sarstedt, M., P. Danks, N., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80519-7\\_1](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80519-7_1)
- Hanun, Y. H., & Setiawati, E. (2025). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Etika Auditor dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Inspektorat Kabupaten Sragen). *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6546>

- INTOSAI. (2019). *ISSAI 130-Code of Ethics*. INTOSAI. <https://share.google/wlJnxs4QTtFzq24zC>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1(2). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Kurniawan, E. (2023). The Influence of Auditor Independence on Audit Quality: A Qualitative Research. *Golden Ratio of Auditing Research*, 3(1), 46–56. <https://doi.org/10.52970/grar.v3i1.376>
- Kusuma, G. S. M. (2021). Pengaruh Integritas, Profesionalisme, Dan Beban Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Informasi Artikel. *Jurnal Kompetitif*, 10(1), 15–22. <http://univ-tridinantia.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/index>
- Kusumawardani, D., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Independensi, Audit Fee, Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1).
- Lamba, R. A., Cores Seralurin, Y., Lamba, A., & Pattiasina, V. (2020). The Effect of Auditor Independence and Ethics on Auditor Professional Scepticism: Its Implications for Audit Quality in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 12(8). [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Mahdi, S. A., Nurkholis, Prihatiningtias, Y. W., & Baridwan, Z. (2023). Moderation of Political Pressure on the Determinants of Audit Quality in the Public Sector: A Study of BPK Auditors for the Maluku and North Sulawesi Regions. *AABFJ*, 17(4), 60–72. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i4.05>
- Maulana, D. (2020). Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1).
- Mulyani, S. D., & Munthe, J. O. (2019). Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Audit Fee Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Di Dki Jakarta. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.5229>
- Murdiawati, H. (2025). The Influence of Independence, Integrity, and Professionalism on Audit Quality With Auditor Ethics as A Moderating Variable at BPK RI West Sumatra. *JRSSEM 2024*, 04(7). <https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/index>
- Muslim, Nurwanah, A., Sari, R., & Arsyad, M. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Etika Auditor Kualitas Audit. *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 08(02), 100–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.100-112>

- Natalina, A. N. M., Adnantara, K. F., & Junipisa, N. M. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Auditor, Pengalaman Kerja, Perilaku Disfungsional Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Journal Research of Accountng (JARAC)*, 3(2), 173–193.
- Nugroho, R. A. (2023, November 20). 2 Pejabat BPK Leluasa Jual Beli Audit, Ini Penyebabnya! CNBC Indonesia. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120182428-4-490525/2-pejabat-bpk-leluasa-jual-beli-audit-ini-peyebabnya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120182428-4-490525/2-pejabat-bpk-leluasa-jual-beli-audit-ini-peyebabnya?utm_source=chatgpt.com)
- Paranoan, N., Ineltasya, Belolan, B., Palalangan, C. A., Putri Danduru, B., & Eny, N. (2023). Pengaruh Independensi Dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Auditor Dengan Efek Dunning-Kruger Sebagai Variabel Moderasi. In *Accounting Profession Journal (APAJI)* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35593/apaji.v5i1.118>
- Purba, R. H. F., & Hardi, A. S. (2020). Financial Performances and Public Procurement Loss: Indonesia Ministries/State Study. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(1), 1–9.
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairani, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 438–443.
- Rasuli, M., Zarefar, A., Zarefar, A., & Johari, R. J. (2024). Professional Scepticism, Independence, Information Technology, Auditor Competence, And Audit Quality. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 243–257. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.29963>
- Ryn. (2022, July 13). Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap BPK Jabar Rp1,9 Miliar. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220713124120-12-820924/bupati-bogor-ade-yasin-didakwa-suap-bpk-jabar-rp19-miliar>
- Saifudin, Santoso, A., & Violita, D. J. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Moderasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 11(3), 296. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i3.638>
- Sanjaya, I. P. S. (2016). Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manipulasi Aktivitas Riil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2). <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.85-91>
- Sihombing, M. Y., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2023). The Effect of Independence, Professionalism, Competency and Auditor's Experience on the Quality of Audit Report (Empirical Study at BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara). *Accounting and Finance Studies*, 3(4), 277–293. <https://doi.org/10.47153/afs34.8172023>
- Sihombing, R. P. (2023). Mapping of Internal Audit Quality on the Public Sector in Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Economia*, 19(1), 81–94. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.38073>

- Siregar, R. A. (2023, April 13). *BPK Riau Buka Suara soal Auditor Terima Suap dari Bupati Meranti*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6670815/bpk-riau-buka-suara-soal-auditor-terima-suap-dari-bupati-meranti>
- Sisworini, E. (2024). *Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Auditorat Utama Keuangan Negara Iii Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- Sitorus, L., Uswatun H, N., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. *Economic Reviews Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- SPKN. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017*. <https://share.google/6igRUuUjnIJ6bbfdF>
- Sulaeman, A., Ismail, T., & Mulyasari, W. (2024). *The Influence of Competency, Professionalism and Auditor Independence on Audit Quality with Integrity as a Moderation Variable at DKI Jakarta Public Accounting Firm (Empirical Study at The Public Accounting Office of DKI Jakarta Province)*. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 3(5), 487–503. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i5.287>
- Syahrir, S. N. (2022). *Pengaruh Independensi, Integritas dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit*. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 541–554. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.346>
- Wahyuni, E. Y. A., & Rizal, S. (2022). *Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 903–912. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.458>
- Wahyuni, N., Ansar, & Sumarni, S. (2025). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2003–2015.
- Wati, S., Puspitadewi, A., Dwiva, S. A., & Salta, S. (2024). *The Effect of Competence, Integrity, Independence, Objectivity, on Audit Quality with the Moderating Variable of Risk-Based Auditing*. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(2), 439–456. <https://doi.org/10.55927/ijba.v4i2.8727>